

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN TAHUN 2023
DESDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kegiatan (%)
1.	Penunjang	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Rp20.373.567.547	89,9%
	A	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		Rp342.380.370	91,30%
		a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp92.031.160	92%
		b)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp6.307.500	63%
		c)	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp4.791.250	47,9%
		d)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp239.250.460	39,8%
	B	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp12.772.360.367	89,2%
		a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp12.054.860.767	90,6%
		b)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp716.819.600	70,9%
		c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp680.000	66,6%
	C	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp103.991.440	97,9%
		a)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp4.945.940	98,9%
		b)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp99.045.500	97,9%
	D	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp88.445.000	44,2%
		a)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp88.445.000	44,2%
	E	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp1.502.262.865	95,5%
		a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp29.845.000	99,4%
		b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp271.861.500	97%
		c)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp32.034.500	79,4%
		d)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp23.285.000	58,2%
		e)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp37.960.000	94,9%
		f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.066.145.865	97,2%
		g)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp41.131.000	91,4%
	F	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp1.029.960.000	99,9%

		a)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.029.960.000	99,9%
	g	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp1.342.052.698	76,1%
		a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp17.603.000	50,2%
		b)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp475.717.570	89,2%
		c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp848.732.128	71%
	H	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp3.192.114.807	76,4%
		a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Rp146.856.746	99,5%
		b)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan..	Rp19.265.921	77%
		c)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp73.817.300	67,2%
		d)	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp2.862.344.840	96,7%
		e)	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp89.830.000	99,8%
2.	Pengelolaan Aspek Kegeologian			Rp614.066.581	99,6%
	A	Kegiatan : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi		Rp544.281.181	99,7%
		a)	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp199.463.481	99,7%
		b)	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp199.809.200	99,9%
		c)	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp145.008.500	99,7%
	B	Kegiatan : Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Rp69.785.400	98,6%
		a)	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rp29.625.400	98,7%
		b)	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rp19.840.000	99,2%
		c)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan dan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Rp20.320.000	97,9%
3.	Pengelolaan Mineral dan Batubara			Rp1.775.803.485	95,2%
	A	Kegiatan : Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.		Rp298.417.000	149,4%
		a)	Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dala 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	Rp199.702.000	99,8%
		b)	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dala 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	Rp98.715.000	98,7%
	B	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.		Rp1.019.831.235	92,7%
		a)	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.	Rp447.587.559	89,5%
		b)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.	Rp572.243.676	95,3%
	C	Kegiatan : Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara,Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.		Rp297.817.000	99,2%

		a)	Penetapan prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	Rp99.550.000	99,5%
		b)	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	Rp99.802.000	99,8%
		c)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	Rp98.465.000	98,4%
	D	Kegiatan : Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Rp159.738.250	96,8%
		a)	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp9.750.000	65%
		b)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp149.988.250	99,9%
4.	Pengelolaan Energi Terbarukan			Rp278.029.047	92,6%
	A	Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		Rp278.029.047	92,6%
		a)	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Rp91.776.632	91,7%
		b)	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Rp88.430.120	88,4%
		c)	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Rp97.822.295	97,8%
5.	Pengelolaan Ketenagalistrikan			Rp25.380.009.311	97,8%
	a	Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Rp148.145.000	98,7%
		a)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp148.145.000	88,7%
	b	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Rp49.320.000	98,6%
		a)	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Rp49.320.000	98,6%
	C	Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan		Rp25.182.544.311	97,8%
		a)	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp195.456.723	97,7%
		b)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp162.345.230	81,1%
		c)	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp24.824.742.358	97,9%